

## Usulan Resolusi Prabowo Subianto dalam Upaya Peacekeeping Demilitarized Zone dalam Konflik Rusia-Ukraina

Muhamad Dava Aulia<sup>1</sup>, Bryan Alexander Waldy<sup>2</sup>, Prilla Marsingga<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Singaperbangsa Karawang

e-mail: [2110631260029@student.unsika.ac.id](mailto:2110631260029@student.unsika.ac.id)<sup>1</sup>,  
[2110631260051@student.unsika.ac.id](mailto:2110631260051@student.unsika.ac.id)<sup>2</sup>, [prilla.marsingga@fisip.unsika.ac.id](mailto:prilla.marsingga@fisip.unsika.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Konflik Rusia dan Ukraina kembali naik ke dunia internasional sejak eskalasi pada 24 Februari 2022. Berbagai respon diberikan oleh berbagai negara tidak terkecuali Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki kebijakan politik luar negeri bebas aktif yang berarti Indonesia akan turut aktif dalam interaksi luar negeri dan tidak berpihak. Pada 2 Juni 2023, Menteri Pertahanan Indonesia menyampaikan usulan terkait resolusi konflik Rusia-Ukraina dengan pembentukan zona demiliterisasi. Zona demiliterisasi merupakan wilayah yang diterapkan khusus sebagai kawasan netral di antara kedua aktor konflik. Usulan Prabowo Subianto tersebut menuai banyak respon pro dan kontra dari berbagai kalangan dan pihak. Untuk menganalisis usulan resolusi tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan konstruktivis dan model resolusi Johan Galtung yaitu *peacekeeping* dimana suatu pihak mediator berusaha memisahkan pihak yang sedang berkonflik dengan memberi batasan-batasan agar tidak bersinggungan yang berpotensi terjadinya kekerasan dan peperangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun terdapat penolakan terkait usulan resolusi konflik Prabowo Subianto, namun pemberlakuan zona demiliterisasi masih tetap relevan dan dikembangkan dalam konflik Rusia dan Ukraina.

**Kata kunci:** *Konflik Rusia-Ukraina, Resolusi Konflik, Prabowo Subianto, Zona Demiliterisasi, Model Peacekeeping*

### Abstract

The conflict between Russia and Ukraine has returned to the international stage since its escalation on February 24, 2022. Various responses were given by various countries, including Indonesia. Indonesia is a country that has a free and active foreign policy, which means that Indonesia will actively participate in foreign interactions and not take sides. On June 2, 2023, the Indonesian Minister of Defense submitted a proposal regarding the resolution of the Russia-Ukraine conflict with the establishment of a demilitarized zone. A demilitarized zone is an area specifically applied as a neutral area between the two conflict actors. Prabowo Subianto's proposal drew many pro and con responses from various groups

and parties. To analyze the proposed resolution, this research uses a constructivist approach and Johan Galtung's resolution model, namely peacekeeping where a mediator tries to separate the conflicting parties by providing boundaries so that they do not intersect which has the potential for violence and war. This research uses a qualitative method. The results of the study show that despite the rejection of Prabowo Subianto's conflict resolution proposal, the implementation of demilitarized zones is still relevant and developed in the Russia and Ukraine conflict.

**Keywords :** *Russo-Ukraine Conflict, Conflict Resolution, Prabowo Subianto, Demilitarized Zone, Peacekeeping Model*

## PENDAHULUAN

Konflik antara Rusia dan Ukraina kembali naik ke dunia internasional dengan dimulainya serangan oleh pasukan Rusia pada 24 Februari 2022 (Alexander, 2023). Konflik diawali dengan tentara Rusia yang mengepung kota-kota besar di Ukraina seperti Chernihiv, Berdyansk, Kharkiv, Odesa, Sumy, dan sebagian besar wilayah ibukota Kyiv. Presiden Rusia Vladimir Putin pada pidatonya mengumumkan serangan militer ke Ukraina serta menyatakan bahwa tidak ada rencana Rusia untuk menduduki wilayah Ukraina dan mendukung penuh hak rakyat Ukraina untuk menentukan nasib sendiri. Vladimir Putin juga mengklaim bahwa tujuan serangan militer Rusia terhadap Ukraina adalah untuk melindungi rakyat Rusia di Ukraina yang mengalami penindasan oleh rezim Kyiv (Oktarianisa, 2022). Presiden Ukraina Zelensky merespon pidato tersebut dengan memberlakukan darurat militer di Ukraina. Presiden Zelenky memerintahkan mobilisasi umum semua pria Ukraina yang berusia 18 sampai 60 tahun untuk turut berpartisipasi dalam melindungi Ukraina dari serangan militer Rusia (The Guardian, 2022).

Berbagai respon diberikan oleh negara-negara dalam menanggapi konflik antara Rusia dan Ukraina seperti memberikan sanksi kepada Rusia serta mengecam terjadinya konflik tersebut. Indonesia merupakan salah satu negara yang memberikan reaksi netral. Presiden Indonesia Joko Widodo menegaskan bahwa "Perang itu menyengsarakan umat manusia, serta membahayakan dunia." (Widodo, 2022). Dalam pernyataan Joko Widodo tersebut, Presiden Indonesia tidak menunjukkan keberpihakannya terhadap salah satu pihak yang terlibat konflik. Pernyataan Joko Widodo tersebut merupakan contoh bentuk dari sikap politik luar negeri bebas dan aktif dalam dunia hubungan internasional. Dengan sikap bebas aktif tersebut Indonesia dapat secara bebas memilih dalam menentukan kebijakan sendiri tanpa adanya kekangan dari kekuatan pihak lain (Sari, 2023).

Model resolusi konflik yang memungkinkan untuk penyelesaian konflik Rusia dan Ukraina ini adalah model negoisasi dan mediasi. Berbagai upaya telah dilakukan sepanjang berjalannya konflik dalam upaya penyelesaian konflik. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengajukan draft resolusi Dewan Keamanan PBB yang berisi kecaman atas invasi Rusia terhadap Ukraina. Namun dalam pemungutan suara yang dilakukan Dewan Keamanan PBB, Rusia menolak dengan memveto draft resolusi tersebut karena dinilai "Anti Rusia". (CNN Indonesia, 2022). Tidak adanya inisiatif kedua negara untuk mengarah ke jalan damai membuat upaya perdamaian antara Rusia dan Ukraina sulit tercapai. Maka dengan itu,

model resolusi konflik mediasi memungkinkan untuk digunakan. Mediasi dapat dilakukan dengan mendatangkan negara non-blok pihak ketiga yang akan membantu mengarahkan konflik ke arah perdamaian dengan keputusan yang adil bagi kedua belah pihak (Najmi & Lestiyaniingsih, 2022).

Pada 2 Juni 2023, Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto menghadiri *International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-la Dialogue 20<sup>th</sup> Asia Security Summit* di Singapura (Hariyanto, 2023). IISS merupakan sebuah lembaga global yang berdiri pada tahun 1958 yang berbasis di London dan kemudian memiliki cabang di Bahrain, Singapura, dan juga Amerika. Pada awal terbentuknya IISS menaruh fokusnya kepada penolakan senjata nuklir yang kemudian meluas menuju keseluruhan aspek keamanan. Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto dalam summit mengusulkan saran untuk resolusi konflik yang terjadi di antara Rusia dan Ukraina, salah satunya yang menarik perhatian adalah Zona Demiliterisasi dengan basis zona demiliterisasi sudah diimplementasikan di Vietnam, Sinai, serta Korea. Usulan Prabowo Subianto tersebut memunculkan reaksi yang berbeda terhadap dua pihak yang terlibat konflik. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksii Reznikov menganggap bahwa usulan Prabowo bersifat pro-Russia, sedangkan diplomat senior Rusia menyambut baik usulan yang ditujukan untuk menyelesaikan konflik secara damai (CNBC Indonesia, 2023).

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, tulisan ini mencoba untuk menjelaskan mengapa resolusi konflik zona demiliterisasi yang diusulkan Prabowo Subianto di *International Institute of Strategic Studies 20<sup>th</sup> Asia Security Summit* tersebut mendapat berbagai respon pro dan kontra dari kedua belah pihak yang masing-masing memiliki kepentingan nasional. Kemudian, tulisan ini akan menganalisis keefektifan usulan resolusi konflik zona demiliterisasi terhadap konflik Rusia dan Ukraina dengan merelevansikan pengimplementasian resolusi konflik demiliterisasi yang telah dilakukan sebelumnya.

### **Teori Konstruktivis**

Inti pemikiran konstruktivis adalah bahwa dunia sosial, termasuk hubungan internasional sebagai hasil dari konstruksi manusia. Teori konstruktivisme merupakan teori yang menganggap penting keberadaan dan norma. Dalam teori konstruktivis, dijelaskan bahwa realita hubungan internasional sejatinya merupakan *Share of Ideas* dari para pelaku dalam ranah empiris di dunia ini. Aktor-aktor hubungan internasional memilih tindakannya dengan tidak dipengaruhi oleh kepentingan mereka namun oleh gagasan yang mereka kembangkan sendiri (Pramono & Purwono, 2010).

Berdasarkan kerangka teori di atas memberikan implikasi bahwa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto merupakan contoh aktor yang memberikan *Share of Ideas* terkait resolusi konflik dan upaya *peacekeeping* konflik antara Rusia dan Ukraina tanpa pengaruh dan kepentingan personal, namun berdasarkan gagasan yang dikembangkan. Adanya teori konstruktivis juga memberikan argumen dalam penelitian ini bahwa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memberikan argumen dan opini terhadap resolusi konflik untuk membantu dalam penyelesaian dan upaya *peacekeeping* konflik Rusia dan Ukraina.

### **Teori Konflik**

Teori konflik adalah teori yang memandang perubahan sosial yang tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya

konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi berbeda dengan sebelumnya (Raho, 2007). Menurut Wallace dan Allison, konflik memiliki tiga asumsi utama yang saling berhubungan. Asumsi teori konflik menegaskan bahwa manusia memiliki kepentingan masing-masing dan mereka berusaha untuk merealisasikan kepentingan tersebut. Asumsi kedua menunjukkan “power” bukanlah sekedar benda langka dan terbagi secara tidak merata sehingga menjadikannya sebagai sumber konflik. Asumsi ketiga adalah ideologi yang dipandang sebagai senjata yang digunakan oleh berbagai kelompok yang berbeda untuk meraih tujuan dan kepentingan masing-masing (Mas'udi, 2015).

### **Resolusi Konflik**

Resolusi konflik merupakan istilah komprehensif yang mengimplikasikan bahwa sumber konflik yang dalam perlu diperhatikan untuk penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik memiliki peran untuk dimainkan, bahkan dalam zona perang sekalipun. Penyelesaian konflik adalah bagian integral pekerjaan menuju ke arah pembangunan, keadilan sosial, dan transformasi sosial yang bertujuan untuk menangani berbagai masalah dalam kehidupan manusia. Pada hakikatnya resolusi konflik dipandang sebagai upaya penanganan sebab-sebab konflik dan penyelesaian konflik dengan menciptakan hubungan baru yang bisa bertahan lama dan positif di antara pihak yang bermusuhan (Lado, 2021). Menurut Wisnu Sudarhono (Suhardono, 2015), resolusi konflik adalah suatu cara individu untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dengan individu lain secara sukarela. Dalam pelaksanaan resolusi konflik diperlukan sejumlah kemampuan tertentu, kemampuan tersebut seperti membangun, orientasi, dan menciptakan persepsi untuk menghargai perbedaan dan kecedasan emosi, kapasitas komunikasi, berpikir kreatif, serta berpikir kritis. Menurut Johan Galtung (Khaswara, 2021), resolusi konflik memiliki beberapa bentuk dimana Galtung menawarkan beberapa model resolusi yakni *Peacemaking*, *Peacekeeping*, dan *Peacebuilding*. Ketika model tersebut memiliki target yang berbeda. Meski begitu, pelaksanaannya memiliki tujuan akhir yang berupa mewujudkan perdamaian jangka panjang.

### **Zona Demiliterisasi (DMZ)**

Pada dasarnya, Zona Demiliterisasi (DMZ) adalah wilayah yang secara khusus ditetapkan sebagai area netral di antara dua entitas yang bermusuhan, seperti negara-negara yang terlibat dalam konflik bersenjata atau wilayah yang terbagi oleh konflik internal. DMZ adalah produk dari konflik bersenjata yang merenggut nyawa dan menimbulkan kehancuran, menjadi sebuah upaya untuk mengurangi ketegangan dan risiko konflik lebih lanjut. Di DMZ, kehadiran militer dan aktivitas militer dibatasi atau dilarang sepenuhnya, dengan tujuan utama untuk mencegah insiden militer atau serangan lintas perbatasan yang dapat memicu konflik bersenjata lebih lanjut.

DMZ tidak hanya merupakan konsep teoritis, tetapi sering kali diatur oleh perjanjian antara kedua belah pihak yang bersengketa. Misalnya, Zona Demiliterisasi Korea (DMZ Korea) membagi dua Korea yang terbagi sejak akhir Perang Korea pada tahun 1953. DMZ Korea telah menjadi lambang pembagian antara dua Korea dan sekaligus juga menjadi pengingat akan eskalasi potensial dalam konflik yang belum terselesaikan.

Selain itu, DMZ memiliki implikasi simbolis yang penting. Keberadaannya mencerminkan upaya bersama dari pihak-pihak yang berseteru untuk mencapai perdamaian dan stabilitas. DMZ sering kali menjadi fokus perhatian media dan masyarakat internasional,

menjadi lambang dari harapan untuk pemulihan perdamaian dan rekonsiliasi di antara pihak-pihak yang terlibat. Contoh nyata adalah DMZ antara Israel dan Palestina, meskipun belum berhasil sepenuhnya mengakhiri konflik, namun menjadi wujud dari upaya untuk membangun kepercayaan dan kesempatan bagi dialog dan negosiasi yang lebih jauh.

Namun, meskipun DMZ berperan sebagai pilar stabilisasi dalam konflik, keberadaannya juga tidak terlepas dari tantangan. Wilayah-wilayah ini sering menjadi sasaran provokasi atau infiltrasi, mengancam stabilitas yang telah terjaga selama bertahun-tahun. Misalnya, di DMZ Korea, terdapat insiden-insiden yang menyebabkan ketegangan antara kedua Korea. Upaya untuk mengelola dan menjaga DMZ memerlukan kerjasama dan komitmen yang kuat dari kedua belah pihak, serta dukungan dari komunitas internasional.

Dalam konteks global yang terus berubah, DMZ bukan hanya sekadar wilayah geografis, tetapi juga simbol dari aspirasi manusia untuk perdamaian dan rekonsiliasi. Meskipun kompleksitas dan tantangan yang terkait dengan DMZ tidak boleh diabaikan, pentingnya dalam menjaga stabilitas dan menghormati hak asasi manusia serta keinginan untuk hidup dalam perdamaian merupakan inti dari peran DMZ dalam menciptakan dunia yang lebih damai dan stabil.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Relevansi Zona Demiliterisasi Sebagai Resolusi Konflik Antara Rusia dan Ukraina

Zona Demiliterisasi atau *Demilitarization Zone* (DMZ) merupakan wilayah dari dua kekuatan militer yang merupakan batas wilayah yang diakui secara de facto di dunia internasional. Masing-masing negara yang berada diantara atau dalam wilayah tersebut tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas militer. Zona demiliterisasi tersebut memiliki fungsi yaitu untuk melindungi wilayah yang disepakati dalam isi perjanjian gencatan senjata, perjanjian bilateral maupun multilateral, dan perjanjian damai. Zona demiliterisasi telah diimplementasikan diberbagai negara yang dahulunya mengalami konflik seperti Zona demiliterisasi Korea Selatan dan Korea Utara. Korea Selatan dan Korea Utara dipisahkan oleh DMZ yang dibentuk sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata pada 15 Juli 1953 serta menandakan berakhirnya Perang Korea (Rahmadini, 2018).

Melihat pengalaman dan keefektifan DMZ Korea, Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto mengusulkan pada IISS *Shang-ri La Dialogue 20<sup>th</sup>* terkait resolusi konflik Rusia dan Ukraina dengan penetapan zona demiliterisasi dan referendum yang dimediasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendamaikan konflik yang memburuk sejak awal eskalasinya pada tanggal 24 Februari 2022. Usulan Prabowo berisi tentang penerapan gencatan senjata kedua belah pihak, dan membentuk zona demiliterisasi dengan masing-masing pihak mundur dari posisi masing-masing sejauh 15 kilometer. Menhan Prabowo turut menambahkan bahwa zona demiliterisasi tersebut perlu diawasi oleh pasukan perdamaian PBB.

Dalam konteks Perang Korea, pembentukan zona demiliterisasi merupakan hasil dari perang dunia kedua dalam pembagian semenanjung Korea, Utara dan Selatan. Proses pembagian wilayah Korea tersebut diukur dari luas dan total populasi semenanjung. Setengah dari wilayah dan sepertiga dari populasi membentuk Korea Utara. Perang tersebut kemudian disudahi dengan ditandatanganinya gencatan senjata yang isinya ialah

merestorasi antara kedua Korea. Sebagai upaya mencegah perang di masa yang akan datang, pada batas tersebut dibangun DMZ yang berfungsi sebagai zona penyangga antara kedua Korea (Saylor Academy, 2011).

Sedangkan dalam konteks konflik Rusia dan Ukraina, terdapat perbedaan situasi dan kepentingan diantara masing-masing pihak dengan yang dimiliki oleh Korea Utara dan Korea Selatan saat pembentukan zona demiliterisasi. Beberapa faktor yang mendorong pembentukan zona demiliterisasi dalam konflik Rusia dan Ukraina adalah perluasan konflik yang semakin mengkhawatirkan penduduk. Namun, melihat kemajuan agresi Rusia dalam konflik menyebabkan keberatan bagi pihak Ukraina. Usulan Prabowo Subianto dianggap tidak memperhatikan situasi di lapangan dimana Presiden Zelensky berencana untuk melancarkan serangan balik, namun mereka diperintahkan mundur apabila usulan tersebut diberlakukan (Dianti, 2023).

Terdapat perbedaan pandangan terkait usulan pemberlakuan zona demiliterisasi di antara pihak Rusia dan Ukraina. Pada 29 Mei 2023, Mykhailo Podolyak sebagai Penasihat Presiden Ukraina menyatakan bahwa zona demiliterisasi perlu diberlakukan sejauh 100-120 km dan harus dibuat di dalam wilayah Rusia di sepanjang perbatasan Ukraina. Podolyak berpendapat bahwa untuk memastikan keamanan penduduk di beberapa daerah garis depan Ukraina, seperti Belgorod, Bryansk, Kursk, dan Rostov diperlukan adanya zona demiliterisasi sepanjang 100-120 kilometer. Sedangkan, menurut Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev, pemberlakuan zona demiliterisasi atau zona “sanitasi” di Ukraina harus membentang di sepanjang perbatasan Lvov yang merupakan wilayah Ukraina mengingat keputusan negara barat yang berusaha memasok Ukraina dengan persenjataan rudal jarak jauh (CNN Indonesia, 2023). Zona demiliterisasi merupakan kawasan yang bebas dari keberadaan pasukan ataupun peralatan militer, dan memerlukan adanya kontingen pasukan internasional. Berdasarkan Komite Palang Merah Internasional, pembuatan zona demiliterisasi perlu memerhatikan faktor lokasi seperti jaraknya dari zona rumah sakit dan kawasan netral.

Berdasarkan pernyataan Mykhailo Podolyak, terdapat beberapa kota yang menjadi kandidat dibangunnya zona demiliterisasi dengan menentukannya sesuai dengan kriteria dan alasan tertentu. Beberapa kota tersebut yaitu (Mustaqim, 2023) :

1. Zaporizhzhia

Dikenal sebagai Aleksandrovsk yang merupakan sebuah kota di bagian tenggara Ukraina. Kota tersebut merupakan wilayah yang menjadi kandidat utama untuk zona demiliterisasi. Salah satu faktor yang menyebabkannya penting untuk diberlakukannya zona demiliterisasi adalah keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di kota tersebut. Badan Energi Atom Internasional telah menekankan kedua pihak untuk membentuk zona demiliterisasi di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir yang saat ini dikuasai pihak Rusia. Namun, pihak Rusia menolak usulan demiliterisasi penuh tersebut.

2. Kherson

Dikenal sebagai kota pelabuhan yang berlokasi di Sungai Dnieper dan Laut Hitam menjadikannya industri galangan kapal dan pusat ekonomi global. Pihak Rusia berusaha menciptakan boneka Republik Rakyat Kherson dengan gaya politik



separatis dengan dukungan Rusia di wilayah Donbas dan mencoba memaksa anggota dewan lokal untuk turut mendukung dan menahan para aktivis dan pejabat yang menentang mereka. Pada September 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa penduduk Kherson akan dikenal sebagai orang “Rusia” selamanya.

3. Donetsk

Merupakan kota industri yang terletak di timur Ukraina berdekatan dengan Sungai Kalmius di Oblast Donetsk. Berdasarkan administratif, Donetsk merupakan pusat Oblast Donetsk, sedangkan secara historis merupakan ibukota tidak resmi dan kota terbesar di wilayah Donbas yang memiliki ekonomi dan budaya yang kuat. Pada April 2014, Donetsk merupakan tempat pertempuran dalam perang Rusia-Ukraina dimana pasukan separatis pro-Rusia bertempur menghadapi pasukan militer Ukraina untuk menguasai kota dan sekitarnya.

4. Luhansk

Merupakan sebuah kota di bagian timur Ukraina. Berfungsi sebagai pusat administrasi Ukraina, sebelum separatis pro-Rusia menguasai kota pada tahun 2014 dan menjadikannya ibukota Republik Rakyat Luhansk. Pada tahun 2022, Rusia menganeksasi Luhansk.

5. Kharkiv

Kharkiv atau Kharkov, merupakan kota terbesar kedua di Ukraina. Bermayoritas orang Rusia dikarenakan ekspansi industri yang menyebabkan banyaknya tenaga kerja dari pedesaan yang tertekan serta diakibatkan oleh moderasi Uni Soviet. Kharkiv merupakan target utama pasukan Rusia dalam invasi 2022.

6. Chernihiv

Berlokasi di bagian Utara Ukraina, kota ini ditetapkan sebagai kota Pahlawan Ukraina oleh pemerintah Ukraina selama invasi Rusia ke Ukraina pada 2022. Pada Mei 2023, pasukan Rusia meledakan sebuah jalan di Chernihiv yang menghubungkan kota Chernihiv di Ukraina Utara dengan Bryansk di Rusia.

7. Sumy

Terletak di timur laut Ukraina dengan populasi 250.000 orang sebelum perang terjadi. Kota ini terkenal dengan kehidupannya yang lamban dan penduduk yang ramah. Pada 2014, ketika Federasi Rusia menganeksasi Krimea dan menginvasi Donbas, Rusia berupaya menciptakan Republik Rakyat Sumy untuk mempromosikan propaganda Rusia, namun rencana tersebut gagal.

### **Perspektif dan Prediksi DMZ Sebagai Resolusi Konflik Antara Rusia dan Ukraina**

Sejak meletusnya krisis antara Rusia dan Ukraina pada awal tahun 2014, kawasan tersebut telah menjadi titik fokus bagi kekhawatiran internasional akan eskalasi konflik dan potensi ancaman terhadap stabilitas regional. Dalam konteks ini, konsep Zona Demiliterisasi (DMZ) telah menjadi pembahasan yang semakin relevan, menjadi potensi solusi untuk mengatasi ketegangan dan membawa kedamaian ke wilayah tersebut.

Dalam menghadapi eskalasi konflik dan ketegangan antara Rusia dan Ukraina, pengaturan DMZ telah diusulkan sebagai salah satu solusi potensial untuk menghentikan

pertempuran langsung dan memfasilitasi upaya perdamaian. Sebuah DMZ yang diatur secara tepat dapat memberikan ruang untuk mengurangi ketegangan, mencegah insiden militer yang tidak diinginkan, dan memberikan platform untuk dialog diplomatik yang lebih konstruktif antara kedua belah pihak. Prediksi mengenai efektivitas DMZ dalam konteks Rusia-Ukraina bervariasi; beberapa analis yakin bahwa DMZ dapat menjadi langkah awal yang penting menuju perdamaian yang berkelanjutan, sementara yang lain skeptis terhadap kemungkinan Rusia mematuhi persyaratan dan batasan yang ditetapkan oleh DMZ.

Dari perspektif Ukraina, DMZ dapat menjadi alat yang potensial untuk melindungi wilayahnya dari serangan militer yang lebih lanjut oleh Rusia, sambil memberikan ruang untuk memperkuat struktur politik dan ekonomi negara yang lebih independen. Bagi Rusia, DMZ mungkin melihatnya sebagai langkah untuk menstabilkan situasi di wilayah yang dikuasanya tanpa harus menghadapi tekanan internasional yang lebih besar. Namun, keberhasilan DMZ dalam memfasilitasi perdamaian akan sangat tergantung pada kemauan politik dari kedua belah pihak untuk mematuhi persyaratan yang ditetapkan dan melanjutkan dialog yang konstruktif.

Dalam menghadapi kompleksitas krisis antara Rusia dan Ukraina, prediksi dan perspektif DMZ menawarkan potensi sebagai salah satu alat untuk mengakhiri pertempuran langsung, mencegah eskalasi konflik, dan memulai proses perdamaian yang berkelanjutan. Namun, keberhasilan DMZ dalam konteks ini akan tergantung pada berbagai faktor, termasuk kemauan politik, kepatuhan pihak-pihak yang bersengketa, serta dukungan internasional yang diperlukan. Dengan demikian, sementara DMZ mungkin menawarkan jalan menuju perdamaian, implementasinya akan membutuhkan kerjasama yang kuat, komitmen yang tulus, dan upaya bersama dari semua pihak yang terlibat.

Dalam hukum internasional negara dianggap sebagai subjek hukum utama. Dalam suatu hubungan antar subjek internasional khususnya zona demiliterisasi, kerap terjalin pertentangan yang disebabkan oleh perbandingan ataupun perbedaan kepentingan. Konflik yang terjadi sejalin di perbatasan zona demiliterisasi bisa dikatakan sebagai ancaman pertahanan serta keamanan masing-masing negara. Faktor struktural dalam belum tercapainya delimitasi menimbulkan terbentuknya perbandingan interpretasi mengenai zona netral yang ada di perbatasan kedua negara. Dari sudut pandang internasional, pemerintah serta warga berpendapat jika zona netral merupakan zona yang masih belum diresmikan statusnya sebagai milik negara sehingga wajib dikosongkan dari segala kegiatan masyarakat. Sedangkan dari sudut pandang Rusia atau Ukraina, zona itu berpotensi untuk menjadi wilayah spionase atau kawasan koordinasi keamanan antara tantara nasional sehingga kepentingan nasional untuk masing-masing negara untuk mempertahankan wilayahnya tidak dapat dihindarkan. Perbedaan interpretasi ini menghasilkan ketegangan kedua negara, terutama terkait dengan zona demiliterisasi yang disengketakan untuk masing-masing kepentingan nasional. Hal ini memunculkan sentiment negatif kedua belah pihak.

Berasumsi jika kedua negara mencapai perbedaan interpretasi dan kepentingan maka pertentangan tersebut berpotensi menuju konflik. Pertentangan inilah yang kerap disebut sebagai konflik. Konflik antar negara ini diakibatkan oleh sebagian aspek, seperti; politik, ekonomi, ideologi, strategi militer, maupun perpaduan antara kepentingan-



kepentingan tersebut (Suwardi, 2006). Dalam zona demiliterisasi yang sangat ekstrim, konflik antar negara dapat muncul dalam wujud konflik bersenjata. Maka, Rusia dan Ukraina memiliki 2 pilihan dalam pendekatan konflik di zona demiliterisasi, yaitu:

1. Cara-cara penyelesaian damai, yaitu apabila para pihak telah menyepakati untuk menemukan suatu solusi yang bersahabat seperti diplomasi dan kerja sama.
2. Cara-cara penyelesaian secara paksa atau frontal, yaitu solusi yang dipakai atau dikenakan melalui kekerasan seperti agresi maupun spionase (Aldo, 2022)

### **Pro dan Kontra Usulan Zona Demiliterisasi**

Usulan Menteri Pertahanan Indonesia tahun 2023, Prabowo Subianto terkait pembentukan zona demiliterisasi untuk penyelesaian perang antara Rusia dan Ukraina menuai banyak opini dan kontroversi. Deka Anwar, analisis *Institute for Policy Analysis of Conflict* di Jakarta, mengatakan proposal Prabowo Subianto akan memberi pembenaran terhadap Rusia atas agresinya dan bertentangan dengan prinsip integritas wilayah dan penghormatan terhadap kedaulatan Indonesia sendiri. Deka berspekulasi bahwa pidato Prabowo adalah sebuah *Stump Speech* yang biasa disampaikan politisi yang hendak mencalonkan diri untuk jabatan tertentu dan bertujuan untuk mengangkat citranya di pemilihan umum nanti. Deka mengungkapkan bahwa Prabowo berupaya mengambil hati warga negara Indonesia yang pro-Rusia atau memiliki sentiment anti-barat (Dianti, 2023).

Radityo Dharmaputra, Dosen Hubungan Internasional Universitas Airlangga di Surabaya mengkritik bahwa usulan Prabowo Subianto dinilai mengabaikan situasi di lapangan. Radityo menanggapi bahwa saat ini Rusia telah memasuki wilayah Ukraina sejauh ratusan kilometer. Jika sesuai dengan proposal perdamaian yang Indonesia ajukan, bahwa ingin adanya penarikan mundur pasukan sejauh 15 km dan pembentukan zona demiliterisasi. Hal tersebut sangat tidak relevan dikarenakan kuantitas wilayah jajahan Rusia yang sudah luas menguasai wilayah Ukraina serta saat itu, Ukraina sedang mendapatkan banyak dukungan amunisi dari pihak internasional serta dalam posisi siaga penyerangan balik. Dalam usulan tersebut, Prabowo juga menyatakan bahwa perlu adanya pasukan perdamaian yang memerlukan persetujuan Dewan Keamanan PBB. Dalam hal ini, Rusia menjadi salah satu yang diuntungkan dikarenakan Rusia adalah salah satu anggota tetap yang memiliki hak veto secara mutlak (Astuti, 2023). Kemudian, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menyebut gagasan tersebut seolah terdapat sengketa wilayah antar kedua negara. Hikmahanto menyebutkan dalam menyikapi perang Ukraina dan Rusia, Prabowo seharusnya menyampaikan perang harus dihentikan dengan mengedepankan dialog antar kedua belah pihak konflik (Yahya, 2023).

Dosen Universitas Paramadina, Anton Aliabbas menyebut ide resolusi damai dari konflik Rusia dan Ukraina yang dicetuskan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto sudah tepat. Proposal Prabowo, menurut pandangannya terkait zona demiliterisasi tidaklah berlebihan, proposal yang digagas Prabowo sudah jelas dan dapat diukur dengan mudah. Pengamat Pertahanan dan Keamanan Universitas Paramadina itu juga menilai adanya proposal tersebut dapat mengindikasikan Indonesia sudah siap untuk menjadi mediator konflik yang aktif mendorong tawaran agenda perundingan. (Rahmawati, 2023).

Tawaran perdamaian yang diajukan Prabowo langsung ditolak oleh Ukraina. Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksii Reznikov menyebut proposal perdamaian tersebut aneh. Sebab, solusi yang ditawarkan Prabowo justru seperti rencana Rusia, bukan Indonesia. Menurutnya, jalan perdamaian satu-satunya adalah Rusia harus menarik pasukannya dari Ukraina. Sedangkan Rusia yang dijelaskan langsung oleh Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Andrei Rudenko. Dengan adanya pandangan ini, Rudenko mengatakan bahwa pihaknya terbuka tentang setiap proposal perdamaian yang diberikan dan menyambut baik upaya negara mana pun yang bertujuan untuk mencari solusi damai. Hanya saja, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Andre Rudenko mengaku sejauh ini pihaknya tidak memiliki informasi resmi mengenai proposal Prabowo, dan hanya mendengarnya melalui laporan media (Saputra, 2023).

### **Upaya dan Peran Indonesia Sebagai Mediator Dalam Konflik Rusia dan Ukraina**

Indonesia dengan landasan UUD 1945, turut serta dalam menciptakan perdamaian dunia. Dalam konteks konflik Rusia dan Ukraina, ditegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian adalah untuk mengawal isu kemanusiaan, terutama terhadap krisis yang berdampak merugikan berbagai sektor. Keterlibatan Indonesia sebagai mediator konflik menimbulkan pandangan skeptis. Beberapa pengamat beranggapan bahwa Indonesia sejatinya tidak memiliki pengaruh yang kuat untuk menekan kedua belah pihak untuk berdamai (Wibowo, 2022). Dalam kesempatan tertentu, Presiden Indonesia Joko Widodo membangun komunikasi dengan Presiden Ukraina. Joko Widodo membahas berbagai permintaan bantuan khususnya persenjataan kepada Indonesia, namun ditolak Joko Widodo karena bertentangan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia. Joko Widodo juga turut mengundang Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk menghadiri KTT G20 yang diadakan di Bali (Sekretariat Presiden, 2022).

Indonesia turut melakukan kunjungan diplomatik ke Ukraina dalam tujuan pembentukan kerja sama dan negoisasi resolusi konflik. Kunjungan tersebut berlangsung pada 29 Juni 2022, Presiden Joko Widodo bertemu secara langsung dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang merupakan upaya pertemuan pertama Indonesia dengan Ukraina secara langsung dalam merespon konflik Rusia-Ukraina serta menandakan Indonesia merupakan negara Asia pertama yang mengunjungi Ukraina. Merespon kondisi konflik Rusia-Ukraian, Presiden RI Joko Widodo menegaskan bahwa posisi Indonesia di konflik adalah sebagai negosiator yang bertujuan mencari perdamaian antar kedua negara.

Pada 30 Juni 2022, Presiden RI Joko Widodo turut bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk membahas tentang isu kemanusiaan dan resolusi konflik. Indonesia menegaskan bahwa pesan serta perhatiannya terhadap konflik yang telah menimbulkan krisis keamanan dan kemanusiaan. Indonesia turut membujuk Rusia agar kembali menghidupkan semangat perdamaian dan multilateralisme untuk memperbaiki rantai pasok pangan dunia yang mengalami gangguan selama perang berlangsung (Kemenlu RI, 2022). Upaya Indonesia dalam misi perdamaian dalam konflik Rusia dan Ukraina menggunakan instrumen diplomasi memiliki tujuan untuk mencapai perdamaian dan meredam konflik yang terjadi. Kebijakan politik luar negeri Indonesia telah membuat Indonesia berbeda dibandingkan negara-negara lainnya.

## SIMPULAN

Perluasan konflik Rusia dan Ukraina telah menimbulkan kerugian di sektor perekonomian dan kemanusiaan yang mendorong munculnya resolusi-resolusi dalam upaya penyelesaian konflik dan perdamaian. Dalam dialog *IIS Shangri La*, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berpidato dan mengusulkan terkait resolusi konflik Rusia dan Ukraina melalui pemberlakuan zona demiliterisasi. Zona demiliterisasi merupakan sebuah zona bebas aktivitas militer yang berfungsi untuk melindungi kawasan demiliterisasi dengan adanya gencatan senjata, dan perjanjian damai. Zona demiliterisasi telah diberlakukan diberbagai negara sebelumnya seperti *38<sup>th</sup> Paralel* di Korea, zona demiliterisasi antara Irak dan Kuwait, dan Antartika. Zona demiliterisasi biasanya merupakan zona netral tanpa adanya kontrol dari salah satu pihak.

Usulan tersebut menimbulkan kontra di berbagai kalangan ahli di Indonesia. Usulan zona demiliterisasi versi Prabowo Subianto menyatakan bahwa masing-masing pihak untuk mundur 15 km dan membentuk zona demiliterisasi. Pernyataan tersebut dinilai tidak masuk akal dikarenakan kuantitas kawasan jajahan Rusia pada konflik sudah masuk ke daerah kedaulatan Ukraina yang berarti Rusia akan mendapat sebagian dari daerah Ukraina melalui resolusi tersebut. Pandangan lain mengatakan bahwa seharusnya Indonesia mengedepankan dialog antar kedua belah pihak dalam konteks penyelesaian konflik.

Usulan Prabowo Subianto terkait resolusi tersebut ditolak atas perbedaan kepentingan oleh pihak Ukraina yang menganggap bahwa perjanjian tersebut tidak memperhatikan kondisi lapangan dan terkesan pro-Rusia. Pihak Ukraina berpendapat bahwa satu-satunya jalan perdamaian adalah dengan Rusia menarik pasukannya dari Ukraina. Sedangkan, pihak Rusia mengatakan bahwa pihaknya terbuka tentang setiap proposal perdamaian yang diberikan dan akan menyambut baik upaya berbagai negara yang berusaha untuk mencari solusi damai atas konflik Rusia dan Ukraina. Seiring berjalannya konflik, usulan demiliterisasi kembali diangkat ketika penasihat Presiden Ukraina Mykhailo Podolyak menyerukan untuk keberadaan zona demiliterisasi diberbagai kota dengan tujuan keamanan penduduk. Kota-kota yang termasuk dalam kandidat zona demiliterisasi menurut Mykhailo yaitu Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk, Luhansk, Kharkiv, Chernihiv, dan Sumy masing-masing memiliki alasan tersendiri diperlukannya zona demiliterisasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aldo. (2022). *Zona Netral dan Akibat Hukum Menurut Hukum Internasional*. Ambon: Perpusatakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura.
- Alexander, A. (2023). Crisis and General International Law:Lessons From The Russia-Ukraine Conflict. *Indonesian Journal of International Law*.
- Astuti, S. D. (2023). *Dosen HI UNAIR Nilai Proposal Perdamaian Yang Diajukan Indonesia Kurang Relevan Dengan Situasi Konflik Rusia-Ukraina* . Retrieved from UNAIR News: <https://unair.ac.id/dosen-hi-unair-nilai-proposal-perdamaian-yang-diajukan-indonesia-kurang-relevan-dengan-situasi-konflik-rusia-ukraina/>
- CNBC Indonesia. (2023). *Panas! Jawab Ngegas Prabowo Bahas Solusi Damai Rusia-Ukraina*. Retrieved from CNBC Indonesia:

- <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230608051334-4-444002/panas-jawab-ngegas-prabowo-bahas-solusi-damai-rusia-ukraina>
- CNN Indonesia. (2022). *Rusia Veto Resolusi Dewan Keamanan PBB Atas Invasi di Ukraina*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220226102501-134-764371/rusia-veto-resolusi-dewan-keamanan-pbb-atas-invasi-di-ukraina>
- CNN Indonesia. (2023). *Putin Pertimbangkan Zona Demiliterisasi di Tanah Ukraina*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230615140322-134-962273/putin-pertimbangkan-zona-demiliterisasi-di-tanah-ukraina>
- Dianti, T. (2023). *Usul Prabowo Subianto Soal Zona Demiliterisasi di Ukraina Tuai Kecaman*. Retrieved from Benar News Indonesia: <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/usul-prabowo-subianto-demiliterisasi-referendum-ukraina-06052023080157.html>
- Hariyanto, P. (2023). *Hadiri IISS Shangri-La Singapura, Prabowo Usulkan 5 Saran Resolusi Konflik Rusia-Ukraina*. Retrieved from Sindonews: <https://nasional.sindonews.com/read/1116579/14/hadiri-iiss-shangri-la-singapura-prabowo-usulkan-5-saran-resolusi-konflik-rusia-ukraina-1685793964>
- Kemenlu RI. (2022, June 30). *President Jokowi: The Visit to Ukraine Shows Indonesia's Concern for Ukraine*. Retrieved from Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia: <https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-jokowi-bahas-solusi-damai-perang-rusia-ukraina-dengan-sejumlah-pemimpin-negara/>
- Khaswara, F. (2021). *Conflict Theory According to Johan Galtung. The 1st Conference on Ushuluddin Studies*.
- Lado, V. H. (2021). *Macam-Macam Resolusi Konflik Menurut Para Ahli dan Bentuknya*. Retrieved from Tirto: <https://tirto.id/macam-macam-resolusi-konflik-menurut-para-ahli-dan-bentuknya-gbn1>
- Mas'udi. (2015). *Akar-Akar Teori Konflik: Dialektika Konflik; Core Perubahan Sosial Dalam Pandangan Karl Marx dan George Simmel. Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*.
- Mustaqim, A. H. (2023). *7 Kota Calon Zona Demiliterisasi Rusia-Ukraina, Mayoritas di Wilayah Perbatasan*. Retrieved from SINDONews: <https://international.sindonews.com/read/1124367/45/7-kota-calon-zona-demiliterisasi-rusia-ukraina-mayoritas-di-wilayah-perbatasan-1686553591>
- Najmi, C. S., & Lestyaningsih, R. (2022). *Upaya Resolusi Konflik Dalam Perang Rusia - Ukraina 2022. Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 10-11.
- Oktarianisa, S. (2022). *Kronologi & Penyebab Mengapa Rusia Menyerang Ukraina*. Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220225052726-4-318218/kronologi-penyebab-mengapa-rusia-menyerang-ukraina/3>: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220225052726-4-318218/kronologi-penyebab-mengapa-rusia-menyerang-ukraina/3>
- Pramono, S., & Purwono, A. (2010). *Konstruktivisme Dalam Studi Hubungan Internasional : Gagasan dan Posisi Teoritik. Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional*.

- Rahmadini, A. (2018). *Kemunculan Propa-Gangnam 2016 Pasca Penghentian Propaganda Tahun 2004 Dalam Krisis Nuklir di Semenanjung Korea*. Retrieved from Universitas Airlangga Repository: <https://repository.unair.ac.id/76268/>
- Rahmawati, D. (2023). *Dosen Paramadina Nilai Proposal Prabowo Soal Konflik Ukraina-Rusia Konkret*. Retrieved from DetikNews: <https://news.detik.com/berita/d-6755586/dosen-paramadina-nilai-proposal-prabowo-soal-konflik-ukraina-rusia-konkret>
- Raho, B. (2007). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Saputra, A. A. (2023). *Menimbang Resolusi Konflik Rusia-Ukraina ala Prabowo*. Retrieved from Sindonews: <https://nasional.sindonews.com/read/1123771/16/menimbang-resolusi-konflik-rusia-ukraina-ala-prabowo-1686488760/30>
- Sari, A. M. (2023). *Politik Luar Negeri Indonesia: Pengertian, Tujuan, Prinsip, dan Landasannya*. Retrieved from Fakultas Hukum UMSU: <https://fahum.umsu.ac.id/politik-luar-negeri-indonesia/>
- Saylor Academy. (2011). *Korean War*. Retrieved from Saylor: <https://resources.saylor.org/wwwresources/archived/site/wp-content/uploads/2011/03/Korean-War.pdf>
- Sekretariat Presiden. (2022, April 29). *Presiden Jokowi Bahas Solusi Damai Perang Rusia-Ukraina Dengan Sejumlah Pemimpin Negara*. Retrieved from Presiden Republik Indonesia: <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-jokowi-bahas-solusi-damai-perang-rusia-ukraina-dengan-sejumlah-pemimpin-negara/>
- Suhardono, W. (2015). *Konflik dan Resolusi*. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i UIN Syarif Hidayatullah*.
- Suwardi, S. S. (2006). *Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- The Guardian. (2022, February). *Russia-Ukraine Crisis Live News: Putin Has Launched 'full-scale invasion', says Ukrainian Foreign Minister*. Retrieved from The Guardian: <https://web.archive.org/web/20220224054309/https://www.theguardian.com/world/live/2022/feb/23/ukraine-russia-news-crisis-latest-live-updates-putin-biden-europe-sanctions-russian-invasion-border-troops>
- Wibowo, E. A. (2022, Juni 28). *Jokowi ke Rusia dan Ukraina, Guru Besar UI : RI Miliki Kekuatan Moral Hentikan Perang*. Retrieved from Nasional Tempo: <https://international.sindonews.com/read/1124367/45/7-kota-calon-zona-demiliterisasi-rusia-ukraina-mayoritas-di-wilayah-perbatasan-1686553591>
- Widodo, J. (2022, February 25). *Jokowi Tunjukkan Sikap Tak Berpihak Pada Konflik Rusia-Ukraina*. Kompas.com.
- Yahya, A. N. (2023). *Ide Zona Demiliterisasi Prabowo Terkait Perang Ukraina-Rusia Dinilai Kurang Tepat*. Retrieved from Kompas: <https://nasional.kompas.com/read/2023/06/07/16574391/ide-zona-demiliterisasi-prabowo-terkait-perang-ukraina-rusia-dinilai-kurang?page=all>